



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1043 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan penyusunan dan penyiapan material Penilaian.
Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- Menganalisis seluruh kelemahan hasil penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas dan penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi Tingkat UAKPA;
 - Menilai dan menentukan tingkatan kelemahan Tingkat UAKPA;
 - Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern Tingkat UAKPA.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pelaksanaan penerapan dan penilaian PIPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2024 dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada bulan September 2024 sampai dengan 15 Januari 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 September 2026

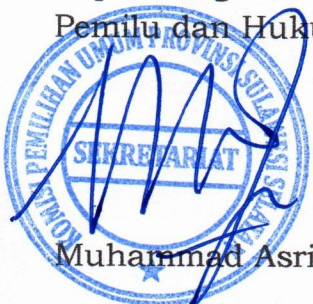
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Asri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
 SELATAN NOMOR 1043 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
 KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
 SELATAN

TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN
 ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Asmar Sugianto	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Tim Penyusun
2	Muhammad Hajir Salam	Kasubag Keuangan	Anggota Tim Penyusun
3	Hendra Aprianto D.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota Tim Penyusun
4	Rini Mandasari	Bendahara	Anggota Tim Penyusun
5	Andi Ida	Staf Subbagian Keuangan	Anggota Tim Penyusun
6	Yusnita Kadir	Staf Subbagian Keuangan	Anggota Tim Penyusun
7	Juliany Willem	Staf Subbagian Keuangan	Anggota Tim Penyusun
8	Abul Achsan	Staf Subbagian Keuangan	Anggota Tim Penyusun
9	Rahmat Sugeng	Staf Subbagian Keuangan	Anggota Tim Penyusun
10	Muhammad Rusman	Operator SIMAN dan SILOG	Anggota Tim Penyusun
11	Bambang Hermansyah	Kabag. Perencanaan, Data, Dan Informasi	Ketua Tim Penilai

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
12	Muhammad Asri	Kabag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Penilai
13	Sutami	Kabag. Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Penilai
14	Andi Irwan Manggabarani	Kasubag Perencanaan	Anggota Tim Penilai
15	Julita Rahayu	Kasubag Hukum	Anggota Tim Penilai
16	Sufyanindra	Kasubag Sumber Daya Manusia	Anggota Tim Penilai
17	Yusdar	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim Penilai
18	Asrul Mustafagani	Kasubag Data dan Informasi	Anggota Tim Penilai
19	Sahyra Ahniza	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Penilai
20	Muhammad Hajir Salam	Kasubag Keuangan	Anggota Tim Penilai

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

